BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

a. **Pendapatan :**

1. Pendapatan Asli Daerah

a)	Pajak Daerah	Rp.	18.269.166.633,15
b)	Retribusi Daerah	Rp.	6.498.279.449,00
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	Rp.	3.333.799.512,16
d)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	54.672.639.404,13
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	82.773.884.998,44

2. Pendapatan Transfer
(Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan)

a)	Bagi Hasil Pajak	Rp.	83.330.843.855,00
b)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp.	205.560.008.497,00
c)	Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp.	570.751.535.000,00
d)	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Rp.	48.328.290.000,00
e)	Dana Bagi Hasil Pajak Dari ProVinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	122.463.873.000,00
f)	Transfer Pemerintah Provinsi	Rp.	88.723.048.470,78
	Jumlah Transfer	Rp.	1.119.157.598.822,78

3. Bantuan Keuangan Dari provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

a)	Bantuan Keuangan untuk Operasional Kab/Kota Untuk Pemerintah Kecamatan	Rp.	54.409.055.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan	Rp.	54.409.055.000,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp.	641.852.618.561,00
b) Belanja Barang	Rp.	283.715.328.668,25
c) Belanja Bunga	Rp.	0,00
d) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
e) Belanja Hibah	Rp.	77.459.346.136,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.523.000.000,00
g) Belanja Bantuan Kepada Desa	Rp.	2.810.265.143,00
h) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	84.537.693.914,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.091.898.252.422.25
2. Belanja Modal		
a) Belanja Tanah	Rp.	1.647.134.800,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	38.108.253.145,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	108.844.044.069,00
d) Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp.	130.037.119.266,15
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	612.464.400,00
f) Belanja Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	279.249.015.680,15
3. Belanja Tidak Terduga		
a) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.930.915.500,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	1.930.915.500,00
4. Transfer		
a) Transfer Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	0,00
Jumlah Transfer	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.373.078.183.602,40
Surplus /Defisit	Rp.	(116.737.644.781,18)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp.	116.149.339.991,40
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	116.149.339.991,40

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 24 Shafar 1438 H
24 November 2016

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, 28 Shafar 1438 H
28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR : 59

Lampiran I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 24 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
1					2	3	4		5
4.					**PENDAPATAN**	**1,601,827,705,918.90**	**1,256,340,538,821.22**	**78.43**	
4.	1.				**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**97,801,429,421.00**	**82,773,884,998.44**	**84.63**	
4.	1.	1.			**HASIL PAJAK DAERAH**	**41,626,000,000.00**	**18,269,166,633.15**	**43.89**	
4.	1.	1.	01.		**Pajak Hotel**	**525,000,000.00**	**465,373,853.00**	**88.64**	a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	01.	009.	Pajak Hotel Melati Satu	525,000,000.00	465,373,853.00	88.64	No. 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan
4.	1.	1.	02.		**Pajak Restoran**	**925,000,000.00**	**2,513,520,175.00**	**271.73**	
4.	1.	1.	02.	002.	Rumah Makan	925,000,000.00	2,513,520,175.00	271.73	b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	03.		**Pajak Hiburan**	**17,500,000.00**	**3,782,600.00**	**21.61**	No. 22 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel
4.	1.	1.	03.	009.	Sirkus/Akrobat/Sulap	17,500,000.00	3,782,600.00	21.61	
4.	1.	1.	04.		**Pajak Reklame**	**675,000,000.00**	**672,620,859.00**	**99.65**	c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	04.	001.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	675,000,000.00	672,620,859.00	99.65	No. 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan
4.	1.	1.	05.		**Pajak Penerangan Jalan Umum**	**7,700,000,000.00**	**6,688,408,310.45**	**86.86**	
4.	1.	1.	05.	001.	Pajak Penerangan Jalan PLN	3,800,000,000.00	4,958,542,771.00	130.49	d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	05.	002.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3,900,000,000.00	1,729,865,539.45	44.36	No. 27 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame
4.	1.	1.	07.		**Pajak Parkir**	**36,000,000.00**	**62,406,360.00**	**173.35**	
4.	1.	1.	07.	001	Pajak Parkir	36,000,000.00	62,406,360.00	173.35	
4.	1.	1.	08.		**Pajak Air Tanah**	**30,000,000.00**	**12,427,139.00**	**41.42**	
4.	1.	1.	08.	001.	Pajak Air Tanah	30,000,000.00	12,427,139.00	41.42	e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	09.		**Pajak Sarang Burung Walet**	**17,500,000.00**	-		
4.	1.	1.	09.	001.	Pajak Sarang Burung Walet	17,500,000.00	-		
4.	1.	1.	11.		**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**1,700,000,000.00**	**576,349,787.00**	**33.90**	No. 29 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran
4.	1.	1.	11.	006.	Pasir dan Batu Kerikil	1,700,000,000.00	576,349,787.00	33.90	
4.	1.	1.	12.		**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**	**25,000,000,000.00**	**5,349,552,622.70**	**21.40**	f. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	1.	12.	001.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25,000,000,000.00	5,349,552,622.70	21.40	No. 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Leges
4.	1.	1.	13.		**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**	**5,000,000,000.00**	**1,924,724,927.00**	**38.49**	
4.	1.	1.	13.	001.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,000,000,000.00	1,924,724,927.00	38.49	g. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.			**HASIL RETRIBUSI DAERAH**	**10,108,300,000.00**	**6,498,279,449.00**	**64.29**	No. 01 Tahun 2003 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.	1.	2.	01.		**Retribusi Jasa Umum**	**5,104,000,000.00**	**1,547,539,100.00**	**30.32**	
4.	1.	2.	01.	001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,085,000,000.00	184,597,000.00	5.98	h. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.	01.	002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	425,000,000.00	434,360,000.00	102.20	No. 25 Tahun 2003 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
4.	1.	2.	01.	005.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	90,000,000.00	119,500,000.00	132.78	i. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.	01.	006.	Retribusi Pelayanan Pasar	133,500,000.00	104,250,000.00	78.09	No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tgl 20 Jan 2011
4.	1.	2.	01.	007.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	560,000,000.00	634,876,500.00	113.37	
4.	1.	2.	01.	008.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	500,000.00	300,000.00	60.00	j. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.	01.	011.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10,000,000.00	5,650,000.00	56.50	No. 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum tgl 24 Mar 2011
4.	1.	2.	01.	013.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800,000,000.00	64,005,600.00	8.00	
4.	1.	2.	02.		**Retribusi Jasa Usaha**	**1,840,000,000.00**	**2,207,533,300.00**	**119.97**	k. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.	02.	001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135,000,000.00	167,337,000.00	123.95	No. 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal tgl 10 Agustus 2011
4.	1.	2.	02.	004.	Retribusi Terminal	60,000,000.00	64,500,000.00	107.50	
4.	1.	2.	02.	008.	Retribusi Rumah Potong Hewan	30,000,000.00	19,630,000.00	65.43	l. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.	1.	2.	02.	010.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	65,000,000.00	111,412,000.00	171.40	No. 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi IMB tgl 10 Agustus 2011
4.	1.	2.	02.	013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,550,000,000.00	1,844,654,300.00	119.01	
4.	1.	2.	02.	016.	Retribusi Mobil Tangki	0.00	-	-	

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
1					2	3	4		5
					Surplus / (Defisit)	(15,000,000,000.00)	(116,737,644,781.18)	778.25	
6.					**PEMBIAYAAN**				
6.	1.				**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	15,000,000,000.00	116,149,339,991.40	774.33	
6.	1.	7.			**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU**	15,000,000,000.00	116,149,339,991.40	774.33	
6.	1.	7.	01.	Sisa	Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu				
					Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	15,000,000,000.00	116,050,339,991.40	773.67	
					Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
					Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
					Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
					Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	99,000,000.00	-	
					Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
6.	1.	7.	02.		Penerimaan Pengembalian dari PERUSDA	-	-	-	
6.	1.	7.	03.		**Penerimaan Dana Bergulir**	-	-	-	
					Jumlah	15,000,000,000.00	116,149,339,991.40	774.33	
6.					**PEMBIAYAAN**				
6.	2.				**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	
6.	2.	7.	01.	Sisa	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.	2.	7.	01.	001.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	
					Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
					Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
					Pembayaran Utang Lainnya	-	-	-	
					Jumlah	-	-	-	
					Pembiayaan neto	15,000,000,000.00	116,149,339,991.40	774.33	
					Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	-	(588,304,789.78)	-	

Plt. BUPATI ROKAN HULU

SUKIMAN

Lampiran I.I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 24 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	**BELANJA**	486.114.260.464,00	422.638.971.101,00	(63.475.289.363,00)	86,94	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	397.088.007.814,00	356.303.166.169,00	(40.784.841.645,00)	89,73	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	**BELANJA PEGAWAI**	397.088.007.814,00	356.303.166.169,00	(40.784.841.645,00)	89,73	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	224.956.254.814,00	217.698.705.104,00	(7.257.549.710,00)	96,77	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	171.510.644.304,00	166.443.433.860,00	(5.067.210.444,00)	97,05	PP No. 34 Tahun 2014
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	18.220.721.770,00	17.900.161.899,00	(320.559.871,00)	98,24	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	329.892.741,00	304.265.000,00	(25.627.741,00)	92,23	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	19.367.876.241,00	18.137.091.000,00	(1.230.785.241,00)	93,65	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.798.886.296,00	10.945.971.840,00	(852.914.456,00)	92,77	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.142.074.732,00	3.407.516.617,00	265.441.885,00	108,45	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.663.426,00	2.524.888,00	(138.538,00)	94,80	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Umum	583.495.304,00	557.740.000,00	(25.755.304,00)	95,59	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	172.131.753.000,00	138.604.461.065,00	(33.527.291.935,00)	80,52	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.492.880.000,00	47.532.252.241,00	(5.960.627.759,00)	88,86	Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 030/DPKA/417/2014
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	118.638.873.000,00	91.072.208.824,00	(27.566.664.176,00)	76,76	Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 030/DPKA/417/2014
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	89.026.252.650,00	66.335.804.932,00	(22.690.447.718,00)	74,51	
5 . 2 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	33.095.411.200,00	31.025.294.740,00	(2.070.116.460,00)	93,75	
5 . 2 . 01 . 01	***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	12.670.000,00	11.748.000,00	(922.000,00)	92,72	
5 . 2 . 01 . 01 . 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	12.670.000,00	11.748.000,00	(922.000,00)	92,72	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.670.000,00	11.748.000,00	(922.000,00)	92,72	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.670.000,00	11.748.000,00	(922.000,00)	92,72	Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 030/DPKA/417/2014

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
6.1.00.00.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	116.050.339.991,40	101.050.339.991,40	773,67	
6.1.00.00.5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman**	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
6.1.00.00.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
6.1.00.00.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.000.000.000,00	116.149.339.991,40	101.149.339.991,40	774,33	

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN